

**KEBIJAKAN PRESIDEN FILIPINA RODRIGO DUTERTE
DALAM MEMERANGI NARKOBA DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HAM PADA TAHUN 2016 - 2021**

Tugas Sarjana

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik



Oleh:

Yazil Mutasodikin

1151004003


**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BAKRIE
2023**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yazil Mutasodikin

Nim : 1151004003

Tanda Tangan : 

Tanggal : 20 Februari 2023

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Yazil Mutasodikin
NIM : 1151004003
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Kebijakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Dalam
Memerangi Narkoba Ditinjau Dari Perspektif HAM Pada ahun
2016 – 2021

Telah berhasil dipertaruhkan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Insan Harapan Harahap, S.Sos., M.AP

()

Penguji 1 : Dr.rer.pol. Aditya Batara Gunawan, S.Sos., M.Litt.

()

Penguji 2 : Yudha Kurniawan, M.A.

()

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 20 Februari 2023

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Sarjana ini diajukan oleh :

Nama : Yazil Mutasodikin

NIM : 1151004003

Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Judul : Kebijakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Dalam Memerangi Narkoba Ditinjau Dari Perspektif HAM Pada ahun 2016 - 2021

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Insan Harapan Harahap, S.Sos., M.AP.

()

Penguji 1 : Dr.rer.pol. Aditya Batara Gunawan, S.Sos., M.Litt.

()

Penguji 2 : Yudha Kurniawan, M.A.

()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 20 Februari 2023

UNGKAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada uhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Program Studi Ilmu Politik pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa awal perkuliahan sampai pada penyusunan Tugas Akhir ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral selama penulis menempuh studi di Universitas Bakrie;
2. Bapak Insan Harapan Harahap, S.Sos, M.AP selaku pembimbing sidang Tugas akhir saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
3. Bapak Dr. rer.pol. Aditya Batara Gunawan, S.Sos, M.Litt selaku Kepala Prodi Ilmu Politik, Universitas Bakrie yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
4. Segenap Staff Akademik dan Non Akademik Universitas Bakrie Staff Universitas Bakrie yang telah membantu segala proses administrasi terkait sidang skripsi ini;
5. Aa Riki Handayani yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama saya berkuliah di Universitas Bakrie;
6. Devi Rachmawati yang selalu membantu dan memberikan dukungan baik tenaga, waktu, dan pikiran selama saya berkuliah di Universitas Bakrie;
7. Teman-teman Keluarga Biji yang selalu memberikan dukungan kepada saya;
8. Seluruh teman-teman Ilmu Politik UB 2015 yang telah memberikan kesan sejak awal perkuliahan hingga selesai;
9. Kepada seluruh teman yang tidak sempat saya sebutkan dan telah mendukung dan turut mendengarkan dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas akhir ini.

Akhir kata penulis berharap uhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir

ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat membawa manfaat bagi pihak terkait dan menjadi referensi untuk pengembangan ilmu.

Jakarta, 20 Februari 2023



Yazil Mutasodikin

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bakrie, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yazil Mutasodikin
NIM : 1151004003
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Jenis tugas Akhir : Skripsi

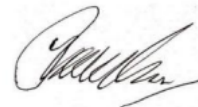
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bakrie Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Kebijakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Dalam Memerangi Narkoba Ditinjau Dari Perspektif HAM Pada tahun 2016 - 2021

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Bakrie berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta untuk kepentingan akademis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Februari 2023



Yazil Mutasodikin

Kebijakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Dalam Memerangi Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Ham Pada Tahun 2016 - 2021

Yazil Mutasodikin

ABSTRAK

Kebijakan *War on Drugs* merupakan kebijakan yang muncul saat pemerintahan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte pada 2016. Kebijakan tersebut muncul karena tingkat kriminalitas di Filipina merupakan nomor satu di Asia Tenggara dan 80% dari kejahatan tersebut disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba. Kebijakan yang bertujuan untuk masalah narkoba di Filipina dengan melakukan pembersihan hingga pembunuhan para pengguna narkoba. Terbukti sebanyak 6.000 – 27.000 korban tewas dalam operasi *War on Drugs* tersebut selama rentang tahun 2016-2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mendapatkan sorotan negatif dari dunia internasional terutama Dewan HAM PBB karena dianggap melanggar HAM yang telah disepakati melalui perjanjian internasional (UDHR, ICCPR, ICESCR), Konstitusi Republik Filipina, dan CMC No. 16-2016. Adapun beberapa indikator HAM yang dilanggar adalah: (1) hak atas hidup; (2) hak atas kebebasan dari penyiksaan; (3) hak untuk diadili secara adil dan terbuka; (4) hak untuk setara di mata hukum; (5) hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu implementasi kebijakan *War on Drugs* tersebut termasuk ke dalam *extrajudicial killing* dengan klasifikasi kejahatan melawan kemanusiaan (*Crime Against Humanity*) dalam Statuta Roma. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dari studi pustaka berupa buku, jurnal, dokumen resmi, artikel ilmiah, dan media digital yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kata Kunci: Kebijakan *War on Drugs*, Presiden Duterte, *Philippines National Police*, Dewan HAM PBB, Lima Indikator HAM, *Extrajudicial Killing*

Philippine President Rodrigo Duterte's Policy in Combating Drugs Viewed from a Human Rights Perspective in 2016-2021

Yazil Mutasodikin

ABSTRACT

The War on Drugs policy is a policy that emerged during the administration of Philippine President Rodrigo Duterte in 2016. The policy emerged because the crime rate in the Philippines is number one in Southeast Asia and 80% of the crime is caused by drug abuse. The policy aims to solve the drug problem in the Philippines by cleaning up and killing drug users. As many as 6,000 - 27,000 people were killed in the War on Drugs operation during 2016-2021. The results of his study shows that the policy received negative attention from the international community, especially the UN Human Rights Council, because it is considered to violate human rights that have been agreed upon through international treaties (UDHR, ICCPR, ICESCR), the Constitution of the Republic of the Philippines, and CMC No. 16-2016. The indicators of human rights violated are: (1) the right to life; (2) the right to freedom from torture; (3) the right to a fair and public trial; (4) the right to be equal in the law; (5) the right to legal protection. In addition, the implementation of the War on Drugs policy is included in extrajudicial killing with the classification of crimes against humanity in the Rome Statute. In his research, the research method used is a qualitative method from literature studies in the form of books, journals, official documents, scientific articles, and digital media related to his research.

Keywords: War on Drugs Policy, President Duterte, Philippines National Police, UN Human Rights Council, Five Human Rights Indicators, Extrajudicial Killing

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
UNGKAPAN TERIMA KASIH	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	6
1.3 Batasan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	9
2.1 Paradigma Teoritik.....	9
2.1.1 Konstruktivisme	9
2.2 Konsep.....	10
2.2.1 Kebijakan	10
2.2.2 <i>War on Drugs</i>	12
2.2.3 Hak Asasi Manusia	13
2.2.4 <i>Extrajudicial Killing</i>	17
2.2.5 <i>Kebijakan Keamanan Nasional Filipina</i>	18
2.3 Penelitian Terdahulu	19
2.4 Alur Berpikir	21
2.5 Operasionalisasi Konsep	22

BAB III	23
3.1 Metode Penelitian.....	23
3.2 Jenis Penelitian.....	23
3.3 Sumber Data.....	24
3.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	24
BAB IV	26
4.1 Hak Asasi Manusia	26
4.2 Hukuman Mati Menurut Hukum Internasional.....	29
4.3 Kebijakan War on Drugs Presiden Duterte Tahun 2016 – 2021.....	33
A. Latar Belakang Kebijakan <i>War on Drugs</i>	33
B. Kebijakan <i>War on Drug</i> dan Mekanismenya	37
C. Impelementasi Kebijakan <i>War On Drug</i> Pada 2016 – 2021 Beserta Dampaknya	40
4.4 Pandangan Dewan HAM PBB erhadap Implementasi Kebijakan War on Drugs Presiden Filipina Duterte.....	46
A. Perspektif Dewan HAM PBB Berdasarkan Lima Indikator HAM Internasional	46
B. Perspektif Pro dan Kontra Publik erhadap Kebijakan <i>War on Drugs</i> Selama 2016-2021	56
BAB V	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61